



Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia

PEDOMAN PENILAIAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Direktorat Kawasan Konservasi
2017



ISBN: 978-602-17280-7-9

Diterbitkan oleh

Direktorat Kawasan Konservasi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kontributor (sesuai dengan urutan abjad):

Aganto Seno (KSDA Kalimantan Timur), Ahmad Munawir (TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum), Andhika Chandra A (Direktorat KK), Christianus L. Awang (TN Wakatobi), Dewi Sulastriningsih (Direktorat KK), Dyah Murtiningsih (Direktorat KK), Dian Risdianto (Direktorat KK), Erna Ika R (Direktorat KK), Erwin Wilianto (Forum Harimau Kita), Evi Indraswati (PILI), Fitri Noor CH (KSDA Sumatera Utara), Haryanto R Putro (Institut Pertanian Bogor), Heru Rudiharto (TN Gunung Bromo Tengger Semeru), Irwan Bempah (Universitas Gorontalo), Iskandar (TN Gunung Merapi), Ismet Khaeruddin (GIZ-Forclime), Iqbal Abadi Rasjid (TN Bantimurung Bulusaraung), Lukita Awang N (TN Bukit Barisan Selatan), M. Muslich (WCS), M. Taufik Hermawan (Universitas Gadjah Mada), Marwedhi N. (Sekjen KLHK), Munawar Kholis (USAID-Lestari), Prihananto (Universitas Cenderawasih), Rudijanta Tjahja Nugraha (Sumatran Tiger Project), Sadtata N.A (TN Aketajawe Lolobata), Sunyoto (TN Karimun Jawa), Suprayitno (Pusat Diklat LH dan Kehutanan), Toni Anwar (IJ REDD), Okta R. Puspita (WCS), Wenda Yandra Komara (Direktorat KK), Wilson Novarino (Universitas Andalas), Yohanes Dwi S (Direktorat KK)

Copyright Photo :

Photo cover: Muara Timur Bandalit TN Meru Betiri (c) TN Meru Betiri

Photo Isi: Megalith Behota TN Lore Lindu © Donny, SM Pulau Semama © Aganto Seno, TN Zamrud © Mapala Silvagama, Helena Sky-Bridge TN Bantimurung Bulusaraung © Iskandar, *Graphium androcles* © Kamajayashagir, Suku Tobelo TN Aketajawe Lolobata © Opan, Monitoring Lamun © TN Wakatobi, Kantung Semar SM Rawa Singkil © BKSDA Aceh, Jejak Penyus TWA Sangalaki © Aganto Seno



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

NOMOR : P. 12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017

**TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI**

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 268 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan bahwa tugas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi;

b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman sebagai dasar untuk pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahkan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

PASAL 1

Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk kawasan teresterial maupun kawasan perairan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan peraturan ini.

PASAL 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat:

- a. pendahuluan;
- b. kerangka kerja efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;
- c. tata cara penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;
- d. hasil penilaian;
- e. lampiran

PASAL 3

Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan dalam melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

PASAL 4

Menugaskan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah serta pihak terkait untuk mempedomani peraturan ini sebagai acuan dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

PASAL 5

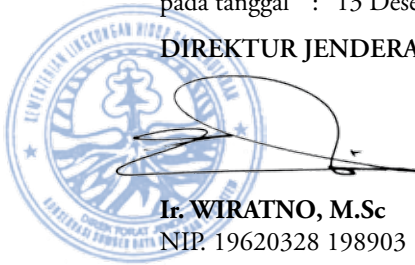
Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka terhadap pelaksanaan penilaian efektivitas yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P. 15/KSDA-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

PASAL 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini maka Peraturan Direktur Jenderal Nomor: P .15/KSDAE- SET/2015 tentang Pedoman penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 13 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003



KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Indonesia merupakan salah satu hotspot keragaman hayati penting di dunia. Sebagai komitmen dalam upaya pelestarian keragaman hayati untuk keperluan umat manusia, sampai tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tidak kurang 27 juta hektar sebagai wilayah perlindungan keragaman hayati yang tersebar dalam 556 unit kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kawasan konservasi tersebut secara keseluruhan ditunjuk dan ditetapkan dengan kepentingan pengelolaan spesifik, mewakili sebagian besar tipe perwakilan ekosistem alam yang ada di wilayah Indonesia, dan merupakan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati terpenting dan mendukung bagian terbesar kepentingan sosial ekonomi budaya masyarakat di Indonesia.

Menjaga keberadaan jenis-jenis sumberdaya penting merupakan salah satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi yang ada. Untuk itu perlu senantiasa dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaan kawasan konservasi yang dimiliki Indonesia. Hal ini selain untuk memastikan bahwa kawasan dikelola sesuai dengan tujuan konservasi yang ditetapkan, juga sebagai alat untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang saat ini masih lemah.

Upaya pemantauan terhadap kondisi pengelolaan kawasan konservasi telah dikembangkan oleh beberapa lembaga di dunia ini, dengan mengacu pada pedoman pemantauan Efektivitas pengelolaan yang dikeluarkan oleh IUCN, sebagai lembaga universal di bidang konservasi keragaman hayati. Salah satu perangkat yang telah digunakan secara luas adalah *METT Management Effectiveness Tracking Tool* (METT).

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pengalaman menggunakan, sederhana dan menghasilkan gambaran yang terukur, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempertimbangkan menggunakan METT sebagai perangkat yang digunakan dalam memantau tingkat pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan. Namun demikian penggunaan METT dilakukan dengan beberapa penyesuaian yang didasari atas situasi pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia

Dengan dikeluarkannya panduan peningkatan Efektivitas pengelolaan kawasan ini diharapkan semua pihak yang mempunyai perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat menggunakan pedoman ini. Dengan keseragaman pedoman yang digunakan diharapkan gambaran kondisi pengelolaan dapat digunakan dalam melihat kondisi pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh di Indonesia.

Penggunaan panduan ini, dalam melihat sejauh mana tingkat pengelolaan yang telah dilakukan, diharapkan menghasilkan masukan-masukan yang akan digunakan dalam upaya perbaikan pengelolaan ke depan. Masukan-masukan tersebut nantinya perlu dituangkan dalam sejumlah rencana aksi yang nyata sehingga memudahkan proses penyusunan rencana untuk perbaikan dalam waktu ke depan.

Sebagai penutup kata, diharapkan pedoman ini menjadi referensi dalam evaluasi pengelolaan dan salah satu alat bantu untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Direktur Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, representing the name Wiratno.

Wiratno

UCAPAN TERIMA KASIH

DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI



Pedoman penilaian Efektivitas pengelolaan ini disusun berdasarkan dokumen Monitoring Effectiveness Tracking Tool “Perangkat Pemantauan Efektivitas Pengelolaan” Edisi kedua yang diterbitkan oleh WWF dan the World Bank dan “Perangkat untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan Efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi perairan”.

Namun demikian beberapa penjelasan terkait dengan kuisisioner pertanyaan telah diperbaiki dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman implementasi penilaian yang dilakukan di Indonesia. Tambahan-tambahan penjelasan juga diberikan untuk memperjelas pilihan-pilihan jawaban yang dimaksudkan semata-mata untuk mengurangi bias pemahaman dalam proses penilaian.

Dokumen ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip penilaian dan pedoman proses penilaian yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas penilaian yang dihasilkan. Sehingga hasil penilaian akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan program-program perbaikan yang direncanakan.

Proses penyempurnaan dokumen ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan, diskusi dan workshop. Keterlibatan dan dukungan para pihak menjadi salah satu poin penting dalam menghasilkan dokumen ini, mulai dari pengelola kawasan (UPT Ditjen KSDAE), Kelompok Kerja Fasilitator Penilaian METT, para Mitra (WCS-IP, GIZ-Forclime, IJ REDD, Forum HarimauKita, PILI), Perguruan Tinggi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Cenderawasih, Universitas Gorontalo, Universitas Kuningan, Universitas Patimura dan Universitas Papua), proyek-proyek yang ada di lingkup Direktorat Jenderal

KSDAE (*Sumatran Tiger Project*, USAID Lestari dan USAID Bijak) serta para mitra lain yang telah berpartisipasi dan berperan dalam proses-proses selama penilaian.

Atas semua dukungan dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan panduan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dokumen dapat menjadi salah satu pendorong dalam perbaikan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia di masa mendatang

Direktur,



Suyatno Sukandar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	03
A. Latar Belakang	03
B. Maksud dan Tujuan.....	06
BAB II KERANGKA KERJA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	09
A. Penilaian Kawasan Konservasi Daratan (<i>Terrestrial</i>)	11
B. Penilaian Kawasan Konservasi Perairan Laut (<i>Marine</i>).....	12
C. Prinsip-Prinsip Penilaian	13
BAB III TATA CARA PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	17
A. Prakondisi	17
B. Proses Penilaian.....	19
C. Verifikasi	22
D. Penyusunan Resume Penilaian dan Rekomendasi.	22
BAB IV HASIL PENILAIAN	25
A. Penyusunan Laporan	25
B. Penyampaian Laporan dan Pengelolaan Informasi Hasil Penilaian	25

LAMPIRAN.....	27
Lampiran 1.	Lembar Data 1: Pelaporan Kemajuan
	Situs Kawasan Konservasi 29
Lampiran 2.	Lembar Data II . Ancaman Kawasan Konservasi 31
Lampiran 3.	Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan
	Kawasan Konservasi Daratan 37
Lampiran 4.	Scorecard Penilaian Efektivitas Pengelolaan
	Kawasan Konservasi Perairan 59
Lampiran 5.	Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan 78
Lampiran 6.	Tabel Pendekatan dalam membuat resume
	dan menentukan rekomendasi 80
Lampiran 7.	Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan
	Kawasan Konservasi 82

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan konservasi, atau sering disebut sebagai kawasan konservasi, memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai benteng perlindungan spesies dan bagi upaya konservasi keragaman hayati. Saat ini terdapat lebih dari 150.000 kawasan konservasi di dunia dengan luasan mencapai sekitar 19 juta km² atau 12,7% permukaan bumi.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah mengalokasikan tidak kurang 27 juta hektar sebagai wilayah perlindungan. Sebagian besar kawasan tersebut disediakan guna perlindungan keragaman hayati yang dimiliki. Adapun rincian 556¹ kawasan konservasi di Indonesia adalah:

1. Cagar Alam sebanyak 219 kawasan;
2. Suaka Margasatwa sebanyak 72 kawasan;
3. Taman Wisata Alam sebanyak 118 kawasan;
4. Taman Hutan Raya sebanyak 28 kawasan;
5. Taman Buru sebanyak 11 kawasan;
6. Taman Nasional sebanyak 54 kawasan; dan
7. Kawasan yang masih berstatus KSA/ KPA sebanyak 54 kawasan.

Fakta menunjukkan bahwa banyak permasalahan dalam pengelolaan KK di Indonesia tersebut. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain adalah kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum *clear and clean*, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal. Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur,

1 Data berdasarkan Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Permasalahan lain yang umum yang terjadi dalam pengelolaan adalah adanya kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Kesadaran akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Indonesia bertekad kuat memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan. Peningkatan kualitas pengelolaan perlu dimonitor menggunakan perangkat yang sesuai. Hal ini juga sejalan dengan *Program of Work (PoW) Convention on Biodiversity* (CBD) tahun 2004. Dalam Dokumen khususnya pada tujuan (*goal*) 4 menyebutkan bahwa setiap negara yang meratifikasi CBD diharuskan untuk:

- a. 4.2.1 Mengembangkan dan mengadopsi, pada tahun 2006, metode, standar, kriteria dan indikator yang tepat untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengaturan kawasan konservasi yang efektif
- b. 4.2.2 Melaksanakan evaluasi pengelolaan yang efektif sedikitnya 30 persen tiap bagian Kawasan Konservasi pada tahun 2010 (ditingkatkan sampai 60 persen pada tahun 2015 saat COP 10 di Nagoya)
- c. 4.2.3 Memasukkan informasi hasil dari evaluasi pengelolaan efektif kawasan konservasi pada laporan nasional di bawah Konvensi Keragaman hayati.
- d. 4.2.4 Melaksanakan rekomendasi penting yang muncul dari evaluasi pengelolaan lapangan dan sistem tingkat, sebagai bagian strategi pengelolaan adaptif yang terintegrasi.

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati Periode 2011-2020 CBD yang dikenal dengan target Aichi 11 menyebutkan bahwa pada Tahun 2020 sedikitnya 17 persen kawasan darat dan perairan tawar dan 10 persen kawasan pesisir dan laut, terutama kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dilindungi dan dikelola dengan baik dan efektif, terwakili secara ekologis, terhubung dengan kawasan konservasi dan terintegrasi dalam lansekap yang lebih luas.

Mempertimbangkan bahwa program peningkatan efektivitas pengelolaan menjadi program nasional pemerintah, maka perlu ditetapkan perangkat yang akan digunakan sebagai sistem monitoring. Sistem ini nantinya akan menjadi perangkat yang wajib

digunakan dalam melakukan penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia oleh pihak-pihak terkait.

Saat ini berbagai metode penilaian efektivitas pengelolaan telah banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia. Menurut Leverington *et al* (2008)², sampai tahun 2008 telah tercatat lebih dari 40 metode penilaian efektivitas dan saat masih terus bertambah. Stoll-Kleemann (2010)³ menyebutkan bahwa *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), *Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management* (RAPAM) dan UNESCO's *Enhancing our Heritage* (EoH) *Toolkit* merupakan metode yang paling banyak digunakan di dunia. Selanjutnya menurut Hockings *et al* (2015)⁴ menyebutkan bahwa METT telah digunakan di 100 lebih negara dan diimplementasikan di lebih dari 2000 kawasan konservasi di dunia.

Management Effectiveness Tracking Tool (METT) yang dikembangkan oleh WWF (World Wildlife Fund) dan Bank Dunia di tahun 2007 menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Namun demikian dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pengalaman dalam penggunaan selama ini di Indonesia, perangkat METT dirasakan perlu untuk dilengkapi dengan beberapa informasi yang diperlukan dalam penerapan di Indonesia.

Penggunaan METT dalam mengukur efektivitas pengelolaan di Indonesia sudah mulai diinisiasi tahun 2010 oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan melalui berbagai workshop dan pelatihan-pelatihan di Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia secara parsial juga dilakukan pada beberapa kawasan konservasi di Indonesia, terutama dalam rangka pengukuran keberhasilan proyek-proyek pendanaan internasional. Beberapa kawasan konservasi perairan laut yang bermitra dengan WWF juga melakukan penilaian efektivitas pengelolaan dengan menggunakan *Score Card* yang dikembangkan khusus untuk kawasan konservasi perairan laut oleh WWF dan World Bank tahun 2004.

2 Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. *Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study*. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.

3 Stoll-Kleemann, S. 2010. Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results. *Basic and Applied Ecology* 11 (2010) 377–382.

4 Hockings, M., Leverington, F. and Cook, C. (2015) 'Protected area management effectiveness', in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds) *Protected Area Governance and Management*, pp. 889–928, ANU Press, Canberra.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut pada tahun 2015, penilaian efektivitas pengelolaan yang merupakan bagian dari peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu “Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati”.

Evaluasi dan monitoring pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode evaluasi yang sama, diharapkan seluruh kawasan konservasi di Indonesia dapat mendapatkan penilaian yang berimbang sehingga menghasilkan formulasi rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penilaian Efektivitas pengelolaan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan baik itu kawasan konservasi baik daratan maupun perairan di Indonesia.

Tujuannya adalah agar hasil penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan mempunyai standar yang sama, dan layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan menjadi sistem monitoring pengelolaan kawasan konservasi.

BAB II
KERANGKA
KERJA
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
KAWASAN
KONSERVASI



BAB II

KERANGKA KERJA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Penilaian Efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan.

Pada konvensi CBD ke-7 tahun 2004, sebanyak 188 negara anggota telah menyepakati program kerja yang diantaranya adalah membangun sistem penilaian dan pelaporan Efektivitas terhadap 30 persen kawasan konservasi atau kawasan konservasi yang ada di dunia.

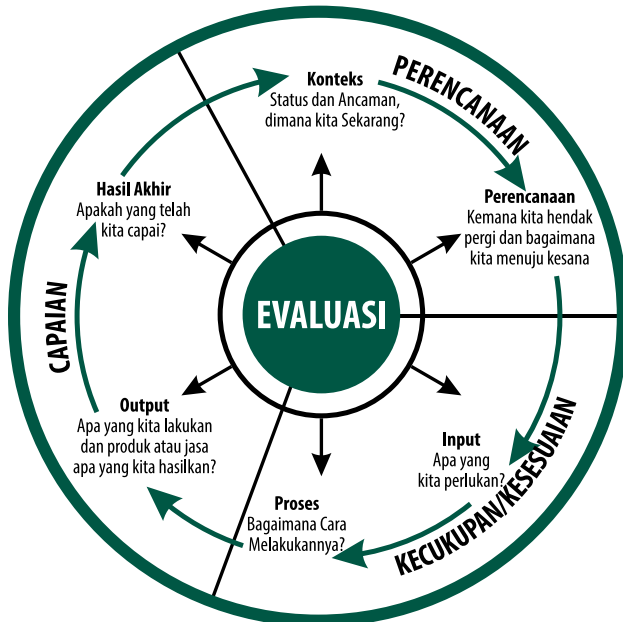
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menyediakan kerangka kerja penilaian Efektivitas pengelolaan secara umum yang diharapkan menjadi panduan perangkat-perangkat penilaian yang dikembangkan di dunia.

Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu:

- 1) Pemahaman akan **konteks** dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.
- 2) **Perencanaan** terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- 3) Alokasi sumberdaya (**input**), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
- 4) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (**proses**),

- 5) Produk dan jasa (**output**) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan,
- 6) Dampak atau **outcome** yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang saling berhubungan, sebagaimana tergambar pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas pengelolaan (IUCN, 2006)

Dalam buku pedoman ini, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dibedakan menjadi dua metode penilaian yaitu menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) untuk kawasan daratan (*terrestrial*) dan menggunakan *Score Card* untuk kawasan perairan laut (*marine*).

Untuk menentukan metode penilaian yang digunakan, pendekatan yang digunakan adalah dengan memperhatikan mandat pengelolaan, nilai penting kawasan dan perbandingan luas perairan laut dengan daratannya. Misalnya pada kawasan konservasi yang mempunyai mandat pengelolaan berupa terumbu karang, maka menggunakan *score card* untuk penilaian efektivitas pengelolaan kawasan tersebut. Pertimbangan penggunaan metode ditentukan oleh pengelola kawasan, mengingat dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada keterangan mengenai pemisahan antara kawasan konservasi daratan (*terrestrial*) maupun perairan laut (*marine*).

A. PENILAIAN KAWASAN KONSERVASI DARATAN (*TERRESTRIAL*)

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daratan di Indonesia menggunakan METT. METT merupakan salah satu perangkat yang secara universal telah digunakan lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi. Perangkat ini pada awalnya dikembangkan oleh WWF dan GEF untuk memantau perkembangan proyek yang dijalankan.

Metode penilaian METT tetap mengikuti kerangka kerja umum penilaian yang diberikan oleh WCPA sebagai panduan umum penilaian Efektivitas di seluruh dunia. Dimana keenam elamen penilaian sesuai kerangka kerja WCPA dinilai dengan kriteria-kriteria yang diukur sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria-Kriteria Dari Elemen Penilaian Yang Dievaluasi

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Bukti Dokumen	Fokus dari evaluasi
Konteks	<i>Dimana kita sekarang?</i> Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	- Arti penting - Ancaman-ancaman - Kerawanan - Konteks nasional - Mitra	SK Penunjukan, Laporan Patroli	Status
Perencanaan	<i>Kemana kita hendak pergi?</i> Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi	- Peraturan dan kebijakan kawasan konservasi - Desain dari sistem kawasan konservasi - Desain dari kawasan konservasi - Perencanaan pengelolaan	RPJP, Zonasi/ blok, Renstra, RTRW,	Kesesuaian

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Bukti Dokumen	Fokus dari evaluasi
Input	<i>Apa yang kita perlukan?</i> Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	- Sumberdaya organisasi - Sumberdaya kawasan	RKA K/L (DIPA), SK Penempatan Pegawai, Data inventarisasi barang, Data dan laporan hasil inventarisasi dan monitoring kawasan	Sumberdaya
Proses-proses	<i>Bagaimana cara melakukannya?</i> Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	- Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan	Dokumen tata batas, daftar riset, dokumen kerjasama, ijin pemanfaatan, dokumen hasil monev,	Efisiensi dan kesesuaian
Output	<i>Apakah hasilnya?</i> Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa	- Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan - Jasa dan produk	RPJPn, daftar fasilitas pengunjung	Efektivitas
Hasil Akhir	<i>Apa yang telah kita capai?</i> Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	- Dampak: efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Dokumen kajian ekonomi, peta tutupan lahan, laporan hasil inventarisasi dan monitoring	Efektivitas dan kesesuaian

B. PENILAIAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT (MARINE)

Mempertimbangkan bahwa METT lebih banyak difokuskan untuk penilaian Efektivitas kawasan daratan dan pada umumnya konservasi perairan laut berkontribusi dan melakukan pendekatan pada ekosistem skala yang lebih besar untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut, maka untuk kawasan konservasi yang didominasi oleh perairan dilakukan dengan menggunakan *Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Area*, yang merupakan adopsi dari METT. Tujuan *score card* ini adalah untuk membantu pengelola kawasan

konservasi perairan menentukan dimana kesuksesan mereka dan dimana sektor yang harus ditingkatkan.

Metode *score card* ini dapat mengevaluasi dan melaporkan performa dari pengelolaan yang telah dilakukan pada kawasan konservasi perairan. Dimana perangkat ini merupakan adaptasi dari perangkat penilaian yang ditujukan untuk kawasan konservasi daratan. Metode penilaian ini telah diadaptasi atau dikembangkan untuk memberikan gambaran singkat dari keadaan awal, upaya pengelolaan dan kemajuan yang telah dicapai selama periode tertentu, dalam meningkatkan Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pendekatan ini juga berguna untuk melihat isu prioritas dan meningkatkan proses pengelolaan, akan tetapi tidak banyak menggambarkan pencapaian dari tujuan pengelolaan.

C. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN

METT merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelola kawasan konservasi secara mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya dirasakan perlu melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif. Penilaian efektivitas harus menjadi bagian dari siklus manajemen yang efektif, yang terkait dengan nilai, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan proses penilaian adalah:

1. **Objektif**, hasil penilaian diharapkan menggambarkan kondisi faktual pengelolaan yang ada. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi dengan beberapa informasi pendukung untuk meyakinkan gambaran yang diberikan dalam penilaian.
2. **Transparan**, proses dan hasil penilaian dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepada publik.
3. **Partisipatif**, proses penilaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian, mulai dari petugas lapangan pengelola kawasan konservasi hingga staf Kantor (Balai/bidang/seksi). Sedangkan pihak eksternal yang penting untuk terlibat adalah masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah dari instansi yang terkait, mitra kerja pengelolaan, pihak swasta yang bekerja di dalam kawasan (penyedia jasa layanan ataupun fasilitas sarana

kunjungan), pengelolaan daerah sekitar/area penyangga kawasan, dan otoritas ilmiah atau perguruan tinggi yang memiliki interest terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai.

4. **Reguler**, mengingat penilaian digunakan untuk memantau progress pengelolaan sehingga penilaian dilakukan secara regular setiap periode waktu tertentu. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan setiap tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sekali.
5. **Independen**, penilaian Efektivitas pengelolaan digunakan murni untuk kepentingan pengelolaan, sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan lainnya.
6. **Introspeksi**, proses penilaian ini dimaksudkan sebagai salah satu cara pengelola untuk melihat kembali progress pengelolaan yang dilakukan. Sehingga pengelola menyadari sejauh mana tahapan keegiatan yang telah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang penting untuk ditindaklanjuti.
7. **Berbagi Pengetahuan/Sharing knowledge**, para pihak yang terlibat dalam proses penilaian diharapkan dapat saling berbagi informasi dari proses penilaian yang dilakukan baik diantara pengelola dan pihak-pihak diluar pengelola.

Penilaian efektivitas merupakan evaluasi yang harus diintegrasikan ke dalam budaya dan proses manajemen untuk meningkatkan kinerja manajemen jangka panjang. Sehingga diharapkan menjadi bagian dari siklus bisnis inti (*core business cycle*) yang terkait dengan pelaporan, perencanaan, pemantauan, penelitian dan program kerja tahunan.

Proses penilaian harus praktis dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal, memberikan keseimbangan yang baik antara pengukuran, pelaporan dan pengelolaan. Evaluasi merupakan proses yang penting namun jangan terlalu banyak menyerap sumber daya yang dibutuhkan manajemen. Dibutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan sebagian besar informasi yang ada (dari pemantauan dan penelitian yang sudah ada sebelumnya) baik dari dalam maupun luar pengelola.

Proses penilaian yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, partisipasi, kepedulian dan kerjasama, baik internal pengelola maupun dengan pihak-pihak mitra lain, dengan demikian penilaian harus dilakukan dalam suasana yang kondusif dan bukan atas dasar saling curiga. Temuan evaluasi, sedapat mungkin, harus positif, mengidentifikasi tantangan dan bukan saling mencari kesalahan.

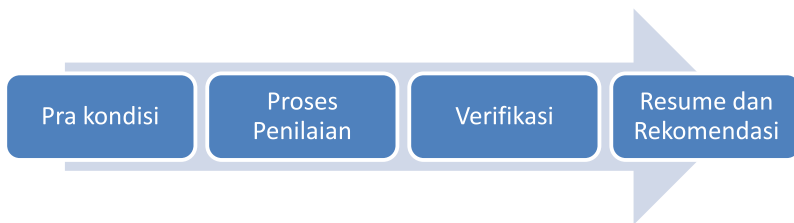
BAB III
TATA CARA
PENILAIAN
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
KAWASAN
KONSERVASI



BAB III

TATA CARA PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Proses penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, verifikasi hingga penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, seperti tersaji dalam Gambar 2.



Gambar 2. Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

A. PRAKONDISI

Tahap Prakondisi merupakan tahap penyiapan dari mulai persiapan tim penilaian yang berasal dari lingkup internal unit pengelola, mengidentifikasi pihak-pihak eksternal yang perlu dilibatkan, hingga penyiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian.

Tahapan kegiatan dalam prakondisi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi rencana penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan
Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak pengelola kepada petugas dan staf yang dinilai mampu untuk melakukan penilaian.

b. Tim penilaian internal

Tim internal di tingkat pengelola ditunjuk oleh kepala unit pengelola sesuai dengan kebutuhan pengelola yang bertugas untuk menyiapkan proses penilaian. Penilai internal akan terdiri dari staf lapangan dan staf kantor (balai, bidang, seksi dan resort).

c. Penyiapan data dan hasil analisis

Setelah dilakukan penyiapan tim, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian mulai dari nilai penting kawasan, anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, gangguan kerawanan dan penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi yang akan dinilai. Data dan hasil analisis akan digunakan sebagai alat verifikasi penilaian. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dapat bersumber dari dokumen internal dan dokumen eksternal sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Dokumen Verifikasi

No.	Jenis Dokumen	Penggunaan
1.	Rencana Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek	Melihat sejauh mana nilai penting kawasan dikelola
2.	Zonasi/Blok Pengelolaan	Melihat pola penggunaan kawasan
3.	Anggaran Pengelolaan	Melihat alokasi penganggaran terhadap kebutuhan pengelolaan nilai penting kawasan
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil setempat, perencanaan detail lainnya seperti Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah,	Melihat pola penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi
5.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Melihat dampak-dampak signifikan pembangunan sekitar kawasan konservasi
6.	Dokumen kerjasama	Melihat kerjasama pengelolaan yang telah dilakukan
7.	Laporan-laporan survey/riset (internal, mitra maupun pihak lain)	Informasi mengenai status konservasi nilai-nilai penting kawasan, analisa sosial ekonomi masyarakat
8.	Dokumen pendukung lainnya	Terkait dengan SDM, hasil riset, program penyadartahuan, sarana prasarana pengelola, inventarisasi potensi, ancaman kerawanan, kerjasama kemitraan, izin pemanfaatan kawasan, dan lain-lain.

- d. Identifikasi pihak eksternal yang perlu dilibatkan.

Untuk memperkuat hasil penilaian dan menjaga independensi, maka proses penilaian ini dilakukan oleh pengelola kawasan bersama-sama dengan pihak terkait. Unsur penilai dari pihak terkait terdiri dari para pemangku kepentingan di sekitar kawasan.

Pemangku kepentingan diantaranya berasal dari badan/instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penilaian dan dari perwakilan mitra kerja. Proses penilaian penting untuk melibatkan perwakilan masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan. Sebagai catatan, apabila terdapat masyarakat adat di wilayah pengelolaan suatu kawasan konservasi, maka perwakilan masyarakat adat tersebut perlu dilibatkan. Adanya pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan pengelola kawasan (misalnya pengusaha pengelola air kemasan dan bentuk kerjasama lainnya) merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang penting untuk terlibat dalam penilaian, selain juga pihak-pihak lain yang mempunyai informasi dan ketertarikan terhadap kawasan seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya. Pada kondisi tertentu dimana dibutuhkan pengetahuan khusus dari ahli, maka dalam proses penilaian dapat melibatkan tenaga ahli tertentu sebagai narasumber

B. PROSES PENILAIAN

Setelah tim internal dari pengelola terbentuk, maka proses penilaian dapat dilakukan melalui pertemuan antara tim internal dan pihak-pihak pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian, maka disarankan untuk tetap menggunakan setidaknya anggota tim yang sama. Jika hal ini tidak dimungkinkan, informasi dari penilai sebelumnya juga dibutuhkan untuk mengarahkan penilaian dan memastikan konsistensi atas evaluasi yang akan dilaksanakan

Proses penilaian dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator⁵ yang memahami tentang proses penilaian Efektivitas pengelolaan. Diskusi ini dihadiri pihak-pihak yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan.

Jawaban-jawaban yang diberikan pada proses penilaian diharapkan merupakan hasil diskusi yang terbuka dan kesepakatan peserta setelah memahami makna-makna dari setiap pertanyaan.

5 Fasilitator adalah orang yang memiliki kompetensi untuk memfasilitai penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Selain menyimpulkan jawaban, penilaian perlu memberikan penjelasan atas kondisi yang ada serta langkah-langkah ke depan untuk merespon isu yang muncul.

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi kuisioner yang terdiri dari :

a) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi (Lampiran 1)

Berisi detil penilaian dan informasi dasar tentang situs, seperti nama, ukuran dan lokasi, dll. Dalam lembar data ini juga diminta untuk mengisi kode kawasan konservasi yang terdapat dalam *World Database on Protected Area* (WDPA) juga dimasukkan. Kode tersebut WDPA dapat diakses melalui situs web *UNEP-World Conservation Monitoring Center* di www.protectedplanet.net. Informasi kontekstual lain seperti penetapan kawasan secara nasional, seperti taman nasional, cagar alam, dll, serta kategori kawasan konservasi menurut IUCN, kepemilikan, jumlah staf dan jumlah anggaran juga dimasukkan dalam lembar data ini serta informasi tentang siapa yang terlibat dalam penilaian. Informasi selanjutnya adalah tentang penetapan internasional pada kawasan yang dinilai, misalnya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, *Man and Biosphere Reserves* (Cagar Biosfer), *Ramsar Site* dan sebagainya.

b) Data Ancaman Kawasan Konservasi (Lampiran 2)

Berisi daftar generik ancaman yang dihadapi kawasan konservasi. Pada lembar data ini penilai diminta untuk mengidentifikasi ancaman dan tingkat dampaknya terhadap kawasan konservasi. Kolom keterangan **wajib diisi** terutama jika terdapat ancaman dimaksud yang menggambarkan kondisi ancaman.

c) Lembar Penilaian (Lampiran 3 dan Lampiran 4)

Lembar Penilaian dengan sekitar 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk tiga kolom untuk mencatat detil dari penilaian, semua pertanyaan harus diisi kecuali untuk pertanyaan yang tidak diwajibkan pada Kawasan Suaka Alam seperti Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

❖ **Pertanyaan - pertanyaan dan nilai**

Penilaian dibuat dengan menggunakan skor sederhana antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik). Empat alternatif jawaban disediakan untuk setiap pertanyaan yang akan membantu penilai memberikan penilaian yang sesuai dengan tingkatan skor yang ada. Sebagai tambahan, terdapat pertanyaan tambahan yang terkait dengan tema kunci pada pertanyaan sebelumnya dan memberikan tambahan informasi dan nilai.

Apabila ada situasi dimana tidak satupun dari empat alternatif jawaban yang sangat sesuai dengan suatu kondisi kawasan konservasi, disarankan agar dipilih jawaban

yang paling mendekati dan gunakan bagian komentar/penjelasan yang tersedia. **Pertanyaan yang tidak relevan dengan suatu kawasan konservasi tertentu bisa ditinggalkan**, dengan menuliskan alasannya dibagian komentar/penjelasan (misalnya pertanyaan mengenai operator wisata pada kawasan cagar alam).

❖ **Komentar/Penjelasan**

Kolom komentar/penjelasan disamping setiap pertanyaan memberikan tempat untuk penjelasan atas penilaian kualitatif dengan lebih detil. Kolom keterangan ini berisi verifikasi-verifikasi untuk setiap jawaban yang dipilih yang akan memberi panduan pengelola menentukan tahapan yang dicapai atau skor yang sesuai, sehingga kolom **komentar/penjelasan ini wajib diisi**. Kolom ini bisa diisi dengan pengetahuan pegawai setempat (dibanyak kasus, pengetahuan pegawai merupakan sumber yang paling informatif dan terpercaya), dokumen referensi, hasil pemantauan atau kajian dan penilaian dari luar – intinya adalah agar semua yang membaca laporan ini mendapatkan gambaran kenapa penilaian dibuat. Penjelasan yang lengkap akan memberikan kepercayaan yang lebih baik atas hasil dari penilaian dengan membuat dasar pembuatan keputusan menjadi lebih transparan. Kolom ini memberikan informasi referensi dan informasi untuk pengelola kawasan di masa mendatang.

❖ **Langkah kedepan**

untuk setiap pertanyaan, penilai diminta untuk mengidentifikasi setiap tindakan yang akan meningkatkan kinerja pengelolaan berupa intervensi pengelola kawasan.

Penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terhadap kawasan konservasi dibedakan atas 2 (dua) kelompok. Untuk kawasan yang mandat pengelolaannya meliputi daratan maka proses penilaian menggunakan METT terrestrial sedangkan kawasan konservasi dengan mandat pengelolaan meliputi perairan dan potensi di dalamnya menggunakan *score card*⁶.

Pada pengulangan proses penilaian, diharapkan untuk melihat/merujuk pada hasil penilaian sebelumnya. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya dan kemudian dapat mengamati sejauh mana perkembangan pengelolaan kawasan dan melihat faktor-faktor penghambat dalam peningkatan Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

⁶ Jika suatu UPT dimandatkan untuk pelestarian terrestrial namun memiliki wilayah perairan maka hal-hal pengelolaan yang terkait dengan perairan akan dimasukkan dalam laporan narasi, sedangkan penilaian tetap menggunakan METT terrestrial.

Leverington *et al.* (2010)⁷ melakukan analisis terhadap berbagai hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di seluruh dunia. Nilai efektivitas pengelolaan dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- < 33% : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)
- 33 - 67% : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)
- > 67% : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)

C. VERIFIKASI

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan proses dan hasil penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama pada pengujian terhadap konsistensi antara jawaban skor yang dipilih, keterangan dan langkah ke depan yang akan dilakukan. Verifikasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ditjen KSDAE.

D. PENYUSUNAN RESUME PENILAIAN DAN REKOMENDASI.

Setelah proses pengisian akan disimpulkan dalam resume hasil penilaian dan rekomendasi. Resume penilaian memberikan masukan berupa beragam pilihan perbaikan sesuai dengan hasil diskusi yang berkembang pada proses penilaian. Langkah-langkah perbaikan yang dicantumkan dalam rekomendasi diharapkan bersifat konkret dan spesifik sehingga tindaklanjut-tindaklanjutnya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola kawasan, direktorat teknis, institusi di internal Kementerian LHK, pemerintah daerah ataupun pihak terkait lainnya.

Resume hasil penilaian yang mencakup beberapa substansi, yaitu:

- a. Nilai Efektivitas pengelolaan kawasan
- b. Faktor kekuatan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan (mengacu pada poin-poin dengan nilai maksimal)
- c. Faktor kelemahan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan.
- d. Isu prioritas yang perlu ditingkatkan.
- e. Resume langkah-langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil penilaian (sesuai didalam formulir). Rekomendasi hasil penilaian akan diarahkan dan didistribusikan kepada unsur penilai dan Pemerintah pusat untuk mendapatkan respon dan tindak lanjut. Resume laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran 7.

⁷ Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.

BAB IV

HASIL PENILAIAN



BAB IV

HASIL PENILAIAN

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan rangkaian dari aktifitas penilaian, perumusan ringkasan/resume hasil penilaian, pelaporan hasil dan tidak lanjut upaya-upaya perbaikan. Dimana pada akhirnya hasil-hasil yang diperoleh untuk seluruh kawasan konservasi di Indonesia perlu ditelaah lebih lanjut guna memberikan gambaran kondisi pengelolaan secara umum di Indonesia, serta dijadikan alat pemantauan oleh Direktorat Jenderal KSDAE terhadap aktifitas-aktifitas perbaikan yang dilakukan di setiap kawasan.

Oleh karena itu setelah proses penilaian, termasuk pembuatan resume penilaian, perlu dilakukan langkah-langkah tindaklanjut yang diambil baik oleh pengelola kawasan konservasi maupun Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistem di pusat. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

A. PENYUSUNAN LAPORAN

Pengelola kawasan (UPT) mempunyai kewajiban menyampaikan hasil penilaian efektivitas pengelolaan dan resume penilaian yang ada. Laporan terdiri dari:

- ❖ Lembar data 1, 2, 3
- ❖ Resume dan Rekomendasi langkah-langkah perbaikan dan rencana aksi baik secara jangka panjang maupun yang perlu segera dilakukan dalam waktu dekat.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN

Laporan hasil penilaian efektivitas yang disusun oleh masing-masing pengelola (UPT) kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem. Penyampaian laporan ini dilakukan tidak lama setelah proses penilaian berlangsung.

Data-data hasil penilaian yang diterima oleh Direktur Jenderal KSDAE akan dikumpulkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi untuk kemudian dilakukan telaahan dan analisa lebih lanjut.

Telaahan dan analisa yang dihasilkan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan laporan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara nasional. Disamping itu informasi juga digunakkan sebagai bahan penentuan kebijakan, baik yang akan dilakukan oleh Ditjen KSDAE maupun yang perlu diinformasikan ke lembaga-lembaga yang dirasakan mempunyai otoritas dalam peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Lembar Data 1: Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

Nama, Afiliasi dan detil kontak penanggung jawab penyelesaian METT (termasuk alamat email)				
Tanggal pelaksanaan penilaian				
Nama Kawasan Konservasi				
Kode situs WDPA (dapat ditemukan di www.protectedplanet.net/wdpa)				
Penetapan	Nasional	Kategori IUCN	Internasional (silakan dilengkapi juga pada halaman sebelah)	
Negara				
Lokasi Kawasan Konservasi (provinsi dan jika dimungkinkan juga peta acuan)				
Tanggal penetapan				
Detil Kepemilikan (Silakan di contreng)	Negara	Swasta	Masyarakat	Lainnya
Otoritas Manajemen				
Luas Kawasan Konservasi (Ha)				
Jumlah Staf	Permanen	Temporer		
Anggaran Tahunan (Rupiah) – tanpa anggaran gaji staf	Dana (operasional) rutin		Dana proyek / tambahan lain	
Apakah nilai utama penetapan Kawasan Konservasi				
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan Kawasan Konservasi				
Tujuan Pengelolaan 1				
Tujuan Pengelolaan 2				
Jumlah orang yang terlibat dalam menyelesaikan penilaian				
Termasuk (contreng kotak)	☐ Pengelola Kaw. Konservasi	☐ Staf Kaw. Konservasi	☐ Staf Lembaga Kaw. Konservasi. lain	☐ LSM
	☐ Masy.Lokal p	☐ Donors p	Ahli dari luar p	☐ Lainnya
Harap dicatat jika penilaian dilakukan dengan asosiasi dengan projek tertentu, atas nama suatu organisasi atau donor				

Informasi tentang Penetapan Internasional			
Situs Warisan Dunia UNESCO (lihat: whc.unesco.org/en/list)			
Tanggal terdaftar	Nama situs	Site area	Geographical co-ordinates
Kriteria penetapan (misal: criteria i sampai x)			
Pernyataan Nilai Penting Universal			
Situs Ramsar (www.wetlands.org/RSDB/)			
Tanggal Terdaftar	Nama situs	Luas situs	Koordinat geografis
Alasan Penetapan (lihat Lembar Informasi Ramsar)			
UNESCO Man and Biosphere Reserves (www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml)			
Tanggal Terdaftar	Nama situs	Luas situs Total: Inti: Buffer: Transisi	Koordinat geografis
Kriteria penetapan (misal: criteria i sampai x)			
Pemenuhan tiga fungsi MAB (dukungan konservasi, pembangunan dan logistik)			
Tuliskan penunjang lain (misal: ASEAN Heritage, Natura 2000) dan informasi pendukung lainnya dibawah			
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		

Lampiran 2. Ancaman Kawasan Konservasi

Ancaman kawasan konservasi diidentifikasi dengan memilih skala ancaman yang ada yaitu tinggi, sedang, rendah dan N/A (tidak ada) dan memberi keterangan kondisi ancaman. Untuk mempermudah pengisian skala ancaman, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jika tidak ada ancaman atau data tidak diketahui maka ancaman tergolong **N/A**
- (2) Jika ancaman terjadi:

- a. **Melihat lokus/sebaran kejadian**

Jika ancaman terjadi di wilayah inti (*core area*) baik di zona inti/blok perlindungan maupun zona/blok lainnya yang berdampak pada nilai penting yang dilindungi kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman terjadi di luar wilayah inti namun masih terus berekspansi, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila perkembangannya dapat ditekan atau dikeluarkan dari kawasan.

- b. **Melihat intensitas ancaman**

Jika ancaman berlangsung massif dan intensif penetrasinya ke dalam kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila penetrasi ancaman masih dapat dikendalikan maka skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila penetrasinya dapat dihentikan dan dikeluarkan dari kawasan.

- c. **Melihat keterpulihan**

Jika ancaman yang terjadi sulit dipulihkan atau perlu jangka waktu lama untuk kembali pulih (>5 tahun) maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman dapat dipulihkan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila dapat segera ditanggulangi dan ekosistem dapat segera dipulihkan.

- d. **Melihat spesies terdampak**

Jika ancaman terbukti berdampak pada spesies kunci dalam kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman berpotensi mengganggu spesies kunci dan spesies lainnya, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila tidak berdampak pada spesies kunci maupun spesies lainnya dalam kawasan.

- e. **Ketersediaan alat bantu** berupa peta *time series* akan membantu peserta menentukan skala ancaman. Untuk dapat mengatakan skala ancaman harus ada baseline dari tahun berapa ancaman dimulai. Lihat juga perubahan ancaman sebelum kawasan konservasi ditetapkan dan setelah penetapan. Apakah penunjukkan kawasan dapat menekan ancaman atau justru memperparah? Proxy jika data tidak ada : lihat penetrasi ancaman terhadap sistem zonasi atau blok.

Lembar Data 2. Ancaman Kawasan Konservasi

Silahkan contong jenis ancaman yang relevan dan memberi keterangan terkait kondisi ancaman.

- Tinggi** : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpotensi tinggi merusak nilai-nilai penting;
Sedang : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpotensi sedang merusak nilai-nilai penting
Rendah : ancaman-ancaman ada tetapi tidak memiliki dampak serius;
N/A : ancaman-ancaman tidak ada atau tidak berlaku di kawasan konservasi tersebut.

Jenis Ancaman		Ancaman	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
1.	Pembangunan pemukiman dan komersial didalam kawasan konservasi						
	Ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (footprint) yang substansial	1.1 Perumahan dan pemukiman					
		1.2 Kawasan komersil dan industri					
		1.3 Infrastruktur wisata dan rekreasi					
2.	Budidaya pertanian dan perikanan didalam kawasan konservasi						
	Ancaman dari pertanian dan penggembalaan akibat perluasan dan intensifikasi pertanian termasuk silvikutur, marikultur dan akuakultur	2.1 Budidaya non kayu Tahunan atau Sepanjang Tahun					
		2.1a Perladangan obat terlarang (drugs)					
		2.2 Perkebunan kayu dan pulp					
		2.3 Peternakan dan penggembalaan					
		2.4 Akuakultur Laut dan Air Tawar					
3.	Produksi energy dan pertambangan di dalam kawasan konservasi						
	Ancaman dari produksi sumber-sumber non-biologis	3.1 Pengeboran minyak dan gas					
		3.2 Pertambangan dan penggalian					
		3.3 Pembangkit energy, termasuk bendungan untuk PLTA dan Panas Bumi					

Jenis Ancaman		Ancaman		Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
4.	Koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi <i>Ancaman dari koridor transportasi yang panjang dan lebar dan kendaraan yang berjalan termasuk keterkaitan kematian satwa liar</i>	4.1	Jalan dan rel kereta					
		4.2	Jalur layanan dan jasa					
		4.3	Jalur dan kanal perkapalan					
		4.4	Jalur penerbangan					
5.	Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis didalam kawasan konservasi <i>Ancaman dari penggunaan konsumtif sumberdaya biologis "liar" termasuk efek pemanenan yang disengaja maupun tidak disengaja; termasuk perburuan atau pengendalian spesies tertentu (catatan: ini termasuk perburuan dan pembunuhan satwa)</i>	5.1	Pemburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat					
		5.2	Pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu)					
		5.3	Pembalakan dan pemanenan kayu					
		5.4	Pemancingan, pembunuhan dan pemanenan sumberdaya air					
6.	Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi <i>Ancaman dari kegiatan manusia yang merubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies yang diasosiasikan dengan penggunaan non-konsumtif sumberdaya biologis</i>	6.1	Kegiatan rekreasi dan wisata					
		6.2	Perang, kerusakan sipil dan latihan militer					
		6.3	Penelitian, pendidikan dan kegiatan terkait pekerjaan lain di kawasan konservasi					
		6.4	Kegiatan pengelola kawasan konservasi					
		6.5	Vandalisme, keg. merusak atau ancaman thd pegawai atau pengunjung					

Jenis Ancaman		Ancaman		Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
7.	Modifikasi system alam <i>Ancaman dari kegiatan lain yang mengkonversi atau merusak habitat atau merubah fungsi ekosistem</i>	7.1 Api dan penahan api (termasuk pembakaran secara sengaja)						
		7.2 Bendungan, modifikasi hidrologis dan pengelolaan/pemanfaatan air						
		7.3 Peningkatan fragmentasi di kawasan konservasi						
		7.4 Isolasi dari habitat alami lain						
		7.5. "Efek tepi" lain terhadap nilai-nilai kawasan konservasi						
		7.6 Kehilangan spesies keystone						
8.	Masalah spesies atau gen invasive dan bermasalah <i>Ancaman dari tanaman, satwa patogen/ mikroba atau materi genetik darat dan air baik asal maupun dari luar yang memiliki efek yang membahayakan keanekaragaman hayati setelah pengenalan, penyebaran dan/ atau peningkatan populasi</i>	8.1 Tanaman invasif non-native/asing						
		8.2 Satwa invasif non-native/asing						
		8.3. Patogen (non-native atau native tetapi menimbulkan masalah baru/meningkat						
		8.4. Pengenalan materi genetic						
9.	Polusi yang masuk atau muncul didalam kawasan konservasi <i>Ancaman dari pengenalan materi atau energi eksotik dan/atau berlebih dari point dan non-point sources</i>	9.1 Saluran buangan rumah tangga atau saluran air limbah kota						
		9.2 Saluran pembuatan atau air limbah dari fasilitas kawasan konservasi						
		9.3 Limbah dan buangan industry, pertambangan dan militer						
		9.4 Pembuangan dari pertanian dan kehutanan						
		9.5 Sampah						
		9.6 Polusi yang terbawa udara						
		9.7 Energi yang berlebih						

Jenis Ancaman		Ancaman		Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
10.	Peristiwa geologis Peristiwa geologis mungkin merupakan bagian dari rezim gangguan alami di banyak ekosistem, tetapi peristiwa ini dapat menjadi ancaman jika suatu spesies atau habitat menjadi rusak atau kehilangan kepentingan dan kerawanan terhadap gangguan kapasitas manajemen untuk merespon beberapa perubahan ini mungkin terbatas	10.1	Gunung berapi					
		10.2	Gempa bumi/Tsunami					
		10.3	Salju/Tanah longsor					
		10.4	Erosi dan pengendapan garam/tanah					
11.	Perubahan iklim dan cuaca buruk Ancaman dari perubahan iklim jangka panjang mungkin terkait dengan perubahan iklim jangka panjang dan peristiwa iklim/ cuaca buruk lain diluar variasi rentang alam	11.1	Perubahan dan kerusakan habitat					
		11.2	Kekeringan					
		11.3	Suhu ekstrim					
		11.4	Badai dan banjir					
12.	Ancaman budaya dan social spesifik	12.1	Hilangnya kaitan budaya, pengetahuan local dan/atau praktik pengelolaan					
		12.2	Penurunan alami nilai-nilai penting situs budaya					
		12.3	Kehancuran bangunan warisan budaya, taman, situs, dll					

Lampiran 3. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
1. Status Hukum Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi ini tidak memiliki dasar hukum	0		
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia			
	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara hukum tetapi prosesnya belum dimulai	1		
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia. Masih berupa inisiasi pembentukan KK.			
<i>Context</i>	Kawasan konservasi tersebut dalam proses mendapatkan status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional)	2		
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia. Dalam proses pengusulan untuk mendapatkan status hukum.			
	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	3		
	Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.			
2. Peraturan kawasan konservasi	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan kawasan dan kegiatan di kawasan konservasi	0		
	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan kawasan di KK. Sehingga tidak mungkin disi o			
	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	1		
	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan kawasan di KK. Sehingga tidak mungkin disi 1			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Planning	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	2		
	Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan			
	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	3		
3. Penegakan Peraturan	Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan.			
	Pegawai tidak memiliki kapasitas dan sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	0		
	Tidak ada pegawai (tetap/temporer) yang khusus mengurus kawasan yang dinilai			
Dapatkan pegawai (cth. mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik?	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas dan sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patrol, kurang dukungan kelembagaan)	1		
	Terdapat pegawai (tetap/temporer). Tidak tersedia anggaran dan dukungan kelembagaan lainnya.			
	Pegawai memiliki kapasitas dan sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	2		
Input	Terdapat pegawai (tetap/temporer). Anggaran tersedia namun belum secara spesifik menegakkan untuk kawasan yang dikelola. Penegakan peraturan dimaksud tidak selalu untuk yustisia, namun juga termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan lainnya			
	Pegawai memiliki kapasitas dan sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	3		
	Terdapat pegawai (tetap/temporer) beserta anggaran patrolinya / pendukung lainnya. Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
4. Tujuan utama dari kawasan konservasi	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	0		
	KK tidak memiliki mandat pengelolaan yang jelas serta belum menyusun Rencana Pengelolaan (Jangka Panjang (RPJP) yang memuat tujuan pengelolaan secara spesifik			
Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati atau tercantum dalam mandat pengelolaan?	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini	1		
	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada tujuan yang ditetapkan			
Planning	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut	2		
	Kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RPJP sebagian telah dilaksanakan			
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	3		
	Semua kegiatan esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam RPJP telah dilakukan			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
5. Desain kawasan konservasi	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama kawasan konservasi yang sangat sulit	0		
	Kawasan tidak memadai dari sisi luas; bentuk; dan lokasi untuk upaya konservasi tujuan pengelolaan.			
	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama yang sulit tetapi beberapa kegiatan mitigasi tengah dilakukan (cth perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai)	1		
	Kawasan tidak memadai namun ada upaya membangun kesepakatan dengan pemangku lahan sekitarnya untuk konservasi tujuan pengelolaan sebagai contoh perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai.			
	Desain kawasan konservasi tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan (cth. terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi)	2		
	Desain kawasan relative memadai namun perlu ditingkatkan antara lain melalui upaya konektivitas dengan kawasan konservasi lain; adanya areal penyangga yang merupakan perluasan habitat yang ada, dll			
	Desain kawasan konservasi membantu pencapaian tujuannya: desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat ; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll	3		
	Kawasan memadai baik secara luas, lokasi dan bentuknya sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
6. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat /pengguna lahan yang bertetangga	0		
	Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan			
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	1		
	Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan			
Process	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local /pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikuatkan dengan tepat	2		
	Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)			
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local /pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat	3		
	Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas			
7. Rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan jangka Panjang/RPJ/P)	Tidak ada rencana pengelolaan untuk Kawasan Konservasi ini	0		
	RP belum disusun			
	Rencana pengelolaan tengah disiapkan atau telah disiapkan tetapi belum diimplementasikan	1		
	Cukup jelas			
	Rencana pengelolaan telah ada tetapi baru sebagian yang diimplementasikan karena kendala pendanaan atau masalah lain	2		

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Planning	Rencana Pengelolaa Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)			
	Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan	3		
	Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain (Pemda/LSM/NGO/ Universitas/private sector)			
Nilai tambahan: <i>Planning</i>				
7a. Proses perencanaan	Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi parapihak untuk mempengaruhi rencana pengelolaan	1		
7b. Proses perencanaan	Konsultasi publik terhadap RP dengan melibatkan para pihak			
	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan	1		
7c. Proses perencanaan	Terdapat rencana review/evaluasi RP. Apabila RP telah disusun sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2011 dengan periode 10 tahun			
	Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan kedalam perencanaan	1		
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJpn)	Cukup jelas			
	Tidak ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang merupakan turunan dari RPJP	0		
	Kawasan tidak memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJpn)			
Apakah ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek tetapi baru beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan	1		
	Kawasan memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJpn) dan telah diimplementasikan sebagian			
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan banyak kegiatan telah diimplementasikan	2		

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Planning/Outputs	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJpN) sebagian besar telah diimplementasikan			
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan semua kegiatan telah diimplementasikan	3		
	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJpN) diimplementasikan seluruhnya			
9. Inventaris sumberdaya (informasi potensi sumberdaya kawasan) Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini?	Terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	0		
	Cukup jelas			
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	1		
	Cukup jelas			
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	2		
Input	Cukup jelas			
	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan	3		
	Informasi terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM)			
10. Sistem perlindungan	Sistem perlindungan (patroli, perijinan, dll) tidak ada atau tidak efektif mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	0		
	Tidak terdapat sistem perlindungan yang dibangun. Pernah dilakukan patroli kawasan dan belum ada sistem pemanfaatan			
	Sistem perlindungan hanya efektif sebagian dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	1		
Apakah sistem telah memadai untuk mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya di dalam Kawasan Konservasi?	Misal sistem diterapkan sebagian misalnya hanya kegiatan patroli saja namun belum ada pengawasan terhadap pemanfaatan atau sebaliknya.			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan		Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
		2			
Process/Outcome	Sistem perlindungan secara moderat efektif mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya				
	Terdapat kegiatan patroli dan pengawasan pemanfaatan namun hanya pada sebagian kawasan dan masih terdapat pelanggaran yang besar.				
	Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	3			
11. Penelitian	Terdapat kegiatan patroli dan pengawasan pemanfaatan. Tidak terdapat pelanggaran atau masih ada namun dalam skala kecil				
	Tidak ada penelitian di kawasan konservasi	0			
	Belum ada penelitian kawasan				
Apakah ada penelitian yang dilakukan secara terprogram untuk mendukung pengelolaan? Apakah kegiatan penelitian berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi? Penelitian yang dilakukan oleh pengelola ataupun pihak lain.	Ada sedikit penelitian tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	1			
	Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan				
	Ada cukup penelitian tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	2			
Penelitian mencakup kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh pengelola ataupun pihak lain.	Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan				
	Ada program penelitian yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	3			
	Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) – Ada database dan pemutakhiran data				

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
12. Pengelolaan sumberdaya	Pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan	0		
	Tidak ada kegiatan pengelolaan			
	Sangat sedikit kegiatan yang secara aktif dilakukan untuk pengelolaan habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis tengah dilakukan. Kebutuhan untuk pengelolaan habitat, spesies dan proses ekologis dan nilai budaya	1		
Process	Pengelolaan terhadap fitur utama masih minimal. Kegiatan terkait tujuan pengelolaan sangat terbatas.			
	Banyak kegiatan yang secara intensif dilakukan untuk pengelolaan habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	2		
	Pengelolaan terhadap fitur utama kawasan sudah dilakukan, tetapi belum mencakup penyelesaian permasalahan terhadap fitur utama. Kegiatan terkait tujuan pengelolaan telah dilakukan			
	Kegiatan-kegiatan intensif dilakukan untuk pengelolaan habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis secara substansial atau sepenuhnya tengah dilaksanakan	3		
	Pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya sudah dilakukan termasuk upaya mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan pengelolaan			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
13. Jumlah pegawai	Tidak ada pegawai	0		
	Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort/KPHK			
	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan yang penting	1		
	Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (pengelolaan yang penting : tenaga administrasi dan teknis)			
	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis	2		
Inputs	Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang			
	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	3		
	Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah			
	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	0		
	Tidak ada staf/petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan			
14. Pelatihan Pegawai	Staf terlatih dan keahlian pegawai relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	1		
	Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan			
	Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan?			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Inputs/Process	Staf terlatih dan keahlian pegawai memadai, tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	2		
	Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan			
	Staf terlatih dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	3		
	Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. Misal: Kawasan dengan tujuan pengelolaan pelestarian kupu-kupu, memiliki staf yang memahami identifikasi kupu-kupu			
15. Anggaran saat ini	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	0		
Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi?	Sudah jelas			
	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	1		
	Sudah jelas			
	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	2		
Inputs	Sudah jelas			
	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	3		
	Sudah jelas			
	Tidak ada kepastian anggaran untuk kawasan konservasi dan pengelolaan sepenuhnya tergantung pada pihak luar atau pendanaan sangat tidak pasti	0		
16. Kepastian anggaran	Tidak ada anggaran spesifik untuk pengelolaan kawasan			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan		Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
		1			
Apakah ada kepastian anggaran?	Ada sedikit kepastian anggaran dan kawasan konservasi tidak dapat berfungsi secara memadai tanpa bantuan dana pihak luar				
	hanya ada alokasi anggaran pengamanan untuk kawasan				
Inputs	Ada cukup kepastian anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regular kawasan konservasitetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar	2			
	Terdapat alokasi anggaran pengelolaan untuk kawasan, (APBN maupun non APBN)				
	Ada kepastian anggaran untuk Kawasan Konservasi dan pemenuhan pengelolaan	3			
	Ada alokasi anggaran (APBN/non APBN) yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sesuai tujuan				
17. Pengelolaan anggaran	Pengelolaan anggaran tidak baik dan secara signifikan mengurangi efektivitas pengelolaan	0			
	Anggaran tidak membiayai kegiatan pengelolaan prioritas				
Apakah anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang penting?	Pengelolaan anggaran kurang baik dan mengurangi efektivitas	1			
	Anggaran hanya sebagian kecil yang membiayai kegiatan pengelolaan prioritas				
Process	Pengelolaan anggaran sudah memadai tetapi perlu ditingkatkan	2			
	Anggaran sebagian besar telah membiayai kegiatan pengelolaan prioritas				
	Pengelolaan anggaran sangat baik dan memenuhi kebutuhan	3			
	anggaran yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan				

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
18. Perlengkapan	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	0		
	Perlengkapan yang ada sangat terbatas dan tidak merupakan perlengkapan utama pengelolaan. Misalnya, hanya ada papan informasi, papan petunjuk, gerbang dll			
	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	1		
	Terdapat perlengkapan utama namun masih sangat kurang untuk pengelolaan. Misalnya, hanya terdapat pondok kerja saja atau perlengkapan lapangan (GPS, kamera dll) dengan jumlah terbatas			
Input	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	2		
	Perlengkapan utama pengelolaan tersedia namun belum sepenuhnya memadai / minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan.			
	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	3		
	Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan - pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (<10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya.			
19. Pemeliharaan perlengkapan	Ada sedikit atau tidak ada pemeliharaan untuk perlengkapan dan fasilitas	0		
	Cukup jelas			
	Ada pemeliharaan yang bersifat <i>ad hoc</i> untuk perlengkapan dan fasilitas	1		
	Pemeliharaan dilakukan secara insidental			
Process	Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas	2		
	Pemeliharaan dilakukan pada perlengkapan dan fasilitas penting			
	Perlengkapan dan fasilitas dipelihara secara memadai	3		
	semua perlengkapan dan fasilitas dipelihara dan berfungsi dengan baik			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
20. Pendidikan dan penyadartahuan	Tidak ada program pendidikan dan penyadartahuan	0		
	Sudah jelas			
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan yang terbatas dan bersifat ad hoc	1		
	Terdapat kegiatan pendidikan dan penyadartahuan namun masih bersifat insidental dan tidak terprogram			
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	2		
<i>Process</i>	Terdapat kegiatan pendidikan dan penyadartahuan yang terprogram namun tidak terlaksana semuanya atau kurang secara kuantitas			
	Terdapat program pendidikan dan penyadartahuan yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	3		
	Terdapat program pendidikan dan penyadartahuan dan sepenuhnya dilaksanakan			
21. Perencanaan penggunaan lahan dan air	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/ kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan	0		
	<i>Misalnya, terdapat pemanfaatan air di luar kawasan konservasi berekosistem rawa/gambut yang berlebihan dan membuat rawa menjadi kering dan rentan kebakaran. Pembangunan di luar yang membuat kawasan terisolasi atau tidak terkoneksi dengan KK Lainnya</i>			
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi , tetapi kegiatan yang ada tidak merugikan kelangsungan kawasan	1		
	<i>Misalnya, Kawasan konservasi berada di hulu, apabila terdapat pemanfaatan air dibawahnya maka tidak merugikan keberadaan/ mengurangi debit air</i>			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Planning	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagian memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	2		
	Misalnya, penggunaan lahan dan air di kawasan hulu memperhatikan keberadaan kawasan konservasi di bawahnya.			
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	3		
Nilai tambahan: Perencanaan lahan dan air				
21a: Perencanaan lahan dan air untuk konservasi habitat	Perencanaan dan pengelolaan di dalam DAS atau lanskap (bentang lahan) lokasi kawasan konservasi memasukkan provisi untuk kondisi lingkungan yang memadai (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air, tingkat polusi air, dll) untuk menjaga habitat yang relevan	1		
	Lansekap yang didalamnya terdapat KK sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan habitat-habitat penting. Contoh : kawasan di hilir, perencanaan di hulu harus mempertimbangkan potensi polusi air secara kuantitatif sudah diperhitungkan. misalnya ambang batas kadar COD, BOD dll			
21b: Perencanaan lahan dan air untuk keterhubungan (konektivitas)	Pengelolaan koridor penghubung kawasan konservasi memberikan jalur bagi satwa liar menuju habitat kunci diluar kawasan konservasi (cth. memungkinkan ikan bermigrasi antara lokasi pemijahan air tawar dan laut atau memungkinkan migrasi satwa)	1		
	Terdapat koridor yang menghubungkan kawasan konservasi dengan kawasan konservasi lainnya			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan		Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
		1			
21c: Perencanaan lahan dan air untuk jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies	"Perencanaan menjawab kebutuhan khusus ekosistem dan/atau kebutuhan spesies tertentu pada skala ekosistem (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air tawar untuk kelangsungan spesies tertentu, pengelolaan api untuk menjaga habitat savana, dll)"				
	Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga selain melindungi kawasan konservasi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas.				
22. Pemerintah dan swasta di sekitar	Tidak ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/ pengelola lahan dan air di sekitar	0			
	Sudah jelas				
Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar?	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama	1			
	Sudah jelas				
Process	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, tetapi hanya ada kerjasama terbatas	2			
	Terdapat kesepakatan/kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar kawasan baik formal maupun informal, namun masih terbatas.				
	Ada komunikasi regular antara pengelola kawasan dan otoritas/ pengguna lahan dan air disekitar, dan ada kerjasama substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi	3			
	Terdapat kesepakatan/kerjasama secara substantif dan menyeluruh antara pengelola dengan mitra. Terdapat pertemuan reguler atau forum pengelolaan kawasan konservasi yang terbangun antara pengelola dan mitra				
23. Masyarakat adat dan Masyarakat Asli/ tradisional	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	0			
	Sudah jelas				

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Apakah masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional yang tinggal atau secara reguler menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi?	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional dapat memberikan sedikit masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengelolaan	1		
	Misalnya hanya terlibat dalam konsultasi publik penyusunan RP dan zonasi/blok			
	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	2		
	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal berperan dalam penentuan zonasi/blok, berperan dalam menentukan jenis dan arah kegiatan dalam RP/kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dll			
	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management	3		
	Masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional berperan aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan yang substantif.			
	Masyarakat lokal tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi	0		
24. Masyarakat lokal	Sudah jelas			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Apakah masyarakat lokal yang tinggal ada berdekatan dengan kawasan konservasi dapat memberikan masukan?	Masyarakat lokal dapat sedikit memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan	1		
	Masyarakat lokal hanya terlibat dalam konsultasi publik penyusunan RP dan zonasi/blok			
	Masyarakat lokal secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka dapat ditingkatkan	2		
Process	Masyarakat lokal dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal berperan dalam penentuan zonasi/blok, berperan dalam menentukan jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dll			
	Masyarakat lokal secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth co-manajemen	3		
	Masyarakat lokal berperan aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan yang substantif.			
Nilai tambahan: Masyarakat lokal				
24 a. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi	1		
	Ada forum reguler			
24b. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1		
	Sudah jelas			
24c. Dampak terhadap masyarakat	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi	1		
	Terdapat peraturan daerah/peraturan desa, adat istiadat (aktif) yang mendukung kelestarian kawasan			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
25. Keuntungan ekonomis	Kawasan konservasi tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung bagi masyarakat lokal	0	Kawasan Suaka Alam tidak wajib mengisi, namun boleh mengisi seperti contohnya : CA Pulau Anak Krakatau, CA Pangandaran, CA Sempu, CA Padang Luway, CA Danau Besar, dll.	
	Sudah jelas			
	Potensi keuntungan ekonomis secara langsung sudah diketahui dan direncanakan untuk direalisasikan	1		
	Sudah terdapat data dan informasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.			
Outcomes	Terdapat aliran keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal	2		
	Masyarakat yang mendapat keuntungan ekonomi pada lokasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan masih terbatas atau bersifat sampingan.			
	Kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat lokal	3		
	Masyarakat yang mendapat keuntungan ekonomi pada lokasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan cukup banyak/lebih luas atau merupakan mata pencaharian utama			
26. Monitoring dan evaluasi	Tidak ada monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	0		
	Monev terhadap pengelolaan kawasan tidak dilakukan. Monev masih terbatas pada pengelolaan anggaran			
	Terdapat kegiatan monitoring and evaluasi secara ad hoc , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara regular	1		
	Monev terhadap pengelolaan kawasan masih terbatas dan dilakukan secara insidental			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
Planning/Process	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	2		
	Monev terhadap pengelolaan kawasan telah dilaksanakan secara reguler menggunakan sistem yang telah disepakati misalnya METT, SMART Patrol atau RBM dsb, namun hasilnya tidak ditindaklanjuti			
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	3		
	Monev dilaksanakan secara reguler dan adaptif menggunakan sistem yang telah disepakati dan hasilnya ditindaklanjuti.			
27. Fasilitas pengunjung	Tidak ada fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung meskipun kebutuhannya telah teridentifikasi	0	Kawasan Suaka Alam tidak wajib ada	
	Sudah jelas			
Apakah fasilitas pengunjung memadai?	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	1		
	fasilitas terbatas pada salah satu bentuk layanan (hanya sanitasi, atau layanan informasi saja)			
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	2		
KSA tidak wajib mengisi	Terdapat fasilitas (jenis, jumlah, fungsi, namun fungsinya kurang memadai (rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya)			
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	3		
Outputs	Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung)			

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
28. Operator wisata komersil Apakah operator wisata komersil berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi? KSA tidak wajib mengisi	Sedikit/tidak ada hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata yang menggunakan Kawasan Konservasi Sudah jelas	0	KSA tidak wajib mengisi	
	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan	1		
	Terdapat operator luar, namun terbatas pada pengurusan SIMAKSI			
	Terdapat kerjasama terbatas antara pengelola kawasan dengan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	2		
	Terdapat komunikasi dalam upaya menjaga nilai-nilai kawasan konservasi			
<i>Process</i> 29. Pungutan (PNBP atau pungutan lain)	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	3	KSA tidak wajib mengisi	
	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata yang terdokumentasi dalam bentuk dokumen kerjasama atau MoU			
	Meskipun secara teori pungutan diterapkan, tetapi pungutan tersebut tidak dikumpulkan	0		
	PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah			
	Pungutan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada Kawasan Konservasi atau lingkungan sekitarnya	1		
KSA tidak wajib mengisi Jika pungutan (cth. Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan KK? KSA tidak wajib mengisi	Pungutan hanya PNBP			
	Pungutan dikumpulkan, dan memberikan sedikit kontribusi pada Kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	2		
	Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/lingkungan sekitarnya yang biasanya diatur Perda			
	Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk KK dan lingkungan sekitarnya	3		
	Belum ada mekanismenya di Indonesia			
Inputs/Process				

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
30. Kondisi nilai-nilai	Banyak nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya yang penting sangat menurun/berkurang	0		
	Tujuan pengelolaan pada saat penunjukan sudah punah Misal : Apabila badak Jawa di TN Ujung Kulon punah			
	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya telah sangat menurun/berkurang	1		
	Misal : populasi badak sumatera di TNKS yang telah punah, namun masih ada fitur utama pengelolaan lain yang masih ada (hairimau sumatera dll)			
Outcomes	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurangtetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan	2		
	Fitur-fitur kawasan berkurang, tetapi fitur utama masih ada			
	Nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh	3		
	Sudah jelas Data berasal dari hasil monitoring. Mandat kelola utama harus ada datanya. Hasil monitoring bisa oleh mitra atau hasil riset			
30a: Kondisi nilai-nilai	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring Sudah jelas	1		
30b: Kondisi nilai-nilai	Program pengelolaan yang spesifik sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya	1		
	Sudah jelas, misal : Program Penangkaran Maleo di SM Bangkiring, Banteng di Baluran, Badak di Way Kambas, mantangan di BBS, savana di Alas Purwo.			
30c: Kondisi nilai-nilai	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan kawasan Konservasi	1		
	Sudah jelas, dilakukan secara rutin			





Lampiran 4. Scorecard Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
A. Konteks: Dimana kita sekarang? Penilaian ancaman penting dan kebijakan yang ada					
1. Status Hukum Apakah kawasan konservasi ini memiliki status hukum? (atau dalam hal kasus kawasan milik swasta apakah kawasan tersebut tercantum dalam perjanjian atau yang serupa?) <i>Konteks</i>	Kawasan konservasi ini tidak pernah ditetapkan secara hukum	<i>Tidak ada</i>	0		
	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai	<i>Tidak ada</i>	1		
	Kawasan konservasi tersebut dalam proses penetapan status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional)	<i>Tidak ada</i>	2		
	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/ Menhutbun/Mentan/Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.	3		
Nilai Tambahan	a. Kawasan telah mendapatkan status pengakuan di tingkat regional dan/ atau internasional (jelaskan secara rinci dalam kolom komentar)	<i>Misalnya RAMSAR, Warisan Dunia dll</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
2. Peraturan kawasan konservasi Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan (cth perburuan) <i>Perencanaan</i>	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi	<i>Tidak ada peraturan pengelolaan KK</i>	0		
	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	<i>Belum menyusun zonasi/blok pengelolaan</i>	1		
	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	<i>Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan</i>	2		
	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	<i>Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan. Penataan kawasan (yang disahkan melalui SK Dirjen) merupakan peraturan kawasan yang paling detail untuk pengelolaan penggunaan lahan dan kegiatan di dalam KK</i>	3		
3. Penegakan hukum Dapatkan pegawai (cth. Mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik? <i>Input</i>	Pegawai tidak memiliki kapasitas/ sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	<i>Tidak ada staf/Resort yang khusus mengurus kawasan</i>	0		
	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas/ sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. Kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patrol, kurang dukungan kelembagaan)	<i>Terdapat staf/Polhut, namun anggaran patrol tidak tersedia</i>	1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	Anggaran patroli tersedia namun belum secara spesifik menegakkan hukum patroli di kawasan. Penegakan hukum tidak selalu untuk hal yang bersifat yustisia, namun juga termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi peraturan.	2		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Terdapat staf/Polhut beserta anggaran patrolinya.	3		
Nilai Tambahan	a. Terdapat sumber dukungan lain (sukarelawan, institusi nasional, masyarakat lokal)	Ada dukungan dana, SDM dari pihak lain melalui kerjasama dalam penegakan hukum	+1		
	b. Pelanggaran secara reguler diproses hukum atau dikenakan denda	Cukup jelas	+1		
b. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan? Proses	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan	0		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan	1		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikukuhkan dengan tepat	Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)	2		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat	Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
b. Integrasi kawasan dalam perencanaan pesisir yang lebih besar Apakah KK Perairan sudah menjadi bagian dalam perencanaan pesisir yang lebih luas? <i>Panduan: Saat ini (2015) sebagian besar provinsi/kabupaten di Indonesia belum memiliki rencana pengelolaan wilayah pesisir, sehingga untuk sementara pada pertanyaan ini, rencana wilayah pesisir diadaptasi menjadi rencana tata ruang wilayah (RTRW).</i>	Tidak/belum ada pembahasan tentang integrasi kawasan kedalam rencana rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten	<i>Cukup jelas</i>	0		
	Ada inisiasi pembicaraan tentang integrasi kawasan kedalam rencana rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten, akan tetapi belum ada proses.	<i>Cukup jelas</i>	1		
	Kawasan dalam proses integrasi kawasan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten	<i>Keberadaan dan status kawasan sudah tercantum dan diakui dalam draft final rencana tata ruang wilayah</i>	2		
	Kawasan merupakan bagian dari rencana rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten	<i>Keberadaan dan status kawasan sudah tercantum dan diakui dalam rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan</i>	3		
Nilai Tambahan Catatan: Justifikasi/bukti ilmiah dapat menggunakan berbagai sumber yang kompeten serta memenuhi standar ilmiah. Catatan: Justifikasi/ bukti ilmiah dapat menggunakan berbagai sumber yang kompeten serta memenuhi standar ilmiah.	a. Kawasan merupakan bagian dari jejaring KK Perairan yang secara kolektif melestarikan fungsi ekosistem perairan yang lebih besar	Adanya justifikasi atau bukti ilmiah dan/atau adanya proses komunikasi dalam konteks pengelolaan jejaring KK perairan	+1		
	b. Kawasan merupakan bagian dari jejaring KK Perairan yang secara kolektif mewakili variasi bio-geografi di ekoregion laut	Adanya justifikasi atau bukti ilmiah dan/atau adanya proses komunikasi dalam konteks pengelolaan jejaring KK perairan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
b. Inventarisasi sumberdaya Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini? <i>Input</i>	Terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	<i>Belum pernah dilakukan inventarisasi potensi atau survey</i>	0		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	<i>Inventarisasi/survey dilakukan oleh pihak lain dan tidak terstruktur</i>	1		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	<i>Inventarisasi potensi oleh pengelola</i>	2		
	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan	<i>Kegiatan RBM atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendapatkan informasi kawasan</i>	3		
7. Kesadaran dan Kepedulian Para pihak Apakah para pihak sadar dan peduli terhadap sumberdaya perairan dan gangguannya	Kurang dari 25% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan, gangguan, dan upaya pengelolaan	<i>Cukup Jelas (melalui survey/kajian/ analisis data)</i>	0		
	Sekitar 25% - 50% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	<i>Cukup Jelas (melalui survey/kajian/ analisis data)</i>	1		
	Sekitar 50% - 75% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	<i>Cukup Jelas (melalui survey/kajian/ analisis data)</i>	2		
	Lebih dari 75% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	<i>Cukup Jelas (melalui survey/kajian/ analisis data)</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
TOTAL NILAI UNTUK KONTEKS (A): 26 ATAU MENYESUAIKAN					
B. Perencanaan – Apa yang ingin kita capai? Penilaian desain dan perencanaan kawasan					
b. Tujuan utama dari kawasan konservasi Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati? <i>Perencanaan</i>	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	Belum menyusun Rencana Pengelolaan (RP)	0		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini	Kawasan Pengelolaan sudah disusun, namun kegiatan tidak mengacu pada RP	1		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut	Sebagian kegiatan yang direncanakan dalam RP dilaksanakan	2		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	Kegiatan telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dalam RP	3		
	Tidak/belum ada rencana pengelolaan untuk kawasan konservasi ini	Cukup jelas	0		
b. Rencana pengelolaan Apakah ada rencana pengelolaan dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan? <i>Perencanaan</i>	Rencana pengelolaan tengah disusun atau telah disusun tetapi belum diimplementasikan	Cukup jelas	1		
	Rencana pengelolaan telah disahkan tetapi baru sebagian yang dapat diimplementasikan (ada kendala pendanaan atau hal lain yang krusial)	Rencana kerja baru mengakomodasi sebagian dari rencana pengelolaan	2		
	Rencana pengelolaan yang telah disahkan tengah diimplementasikan	Rencana kerja sejalan dengan rencana pengelolaan	3		
	a. Terdapat rencana strategis pengelolaan	Renstra sudah disahkan	+1		
Nilai Tambahan	b. Proses perencanaan memberikan peluang yang cukup bagi stakeholder kunci untuk mempengaruhi rencana pengelolaan	Berita acara dan/atau bukti lain yang menunjukkan keterlibatan stakeholder kunci dalam proses perencanaan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
	c. Partisipasi stakeholder termasuk keterwakilan dari keragaman suku, agama, kelompok pengguna serta gender.	Berita acara dan/atau bukti lain yang menunjukkan keterwakilan stakeholder dalam proses perencanaan	+1		
	d. Proses perencanaan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari keputusan yang diambil	Cukup jelas	+1		
	e. Proses perencanaan mempertimbangkan budaya lokal termasuk praktek tradisional, sistem sosial, fitur budaya, situs bersejarah dan monumen.	Cukup jelas	+1		
	f. Terdapat jadwal dan proses untuk review periodik dan pemutakhiran rencana pengelolaan	Cukup jelas	+1		
	g. Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin tergabung dalam perencanaan	Cukup jelas	+1		
	h. Rencana pengelolaan terkait dengan pengembangan dan penegakan Peraturan	Cukup jelas	+1		
TOTAL NILAI UNTUK PERENCANAAN (B): 14 ATAU MENYESUAIKAN					
C. Inputs – Apa yang kita butuhkan? Penilaian sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan					
10. Riset Apakah ada program survey atau riset berbasis pengelolaan? <i>Proses</i>	Tidak ada survey atau riset di kawasan konservasi	Belum ada penelitian atau survey kawasan	0		
	Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen) Ada database tapi berupa cuplikan-cuplikan data</i>	1		
	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen) Ada database</i>	2		
	Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	<i>Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) – Ada database dan pemutakhiran data</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
Nilai Tambahan	a. Adanya kajian/riset daya dukung kawasan terkait pemanfaatan berkelanjutan	Cukup Jelas	+1		
11. Jumlah pegawai Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola kawasan konservasi Inputs	Tidak ada pegawai	<i>Tidak ada staf/petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan</i>	0		
	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan kritis (minimal)	<i>Jumlah pegawai tidak cukup untuk pengelolaan minimal: tenaga partisipasi dan teknis.</i>	1		
	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis (minimal)	<i>Jumlah pegawai cukup namun masih belum optimal</i>	2		
	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Jumlah pegawai ideal untuk pengelolaan kawasan, mulai dari administrasi hingga teknis pengelolaan</i>	3		
	a. Terdapat dukungan tambahan dari program suka-relawan, masyarakat lokal dan lain-lain	<i>Dukungan dari pihak lain di luar skema pendanaan APBN</i>	+1		
Nilai Tambahan		Cukup jelas	0		
12. Anggaran saat ini Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi? Inputs	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	Cukup jelas	0		
	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	<i>Cukup jelas</i>	1		
	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	<i>Cukup jelas</i>	2		
	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Cukup jelas</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
Nilai Tambahan	a. Terdapat kepastian anggaran untuk pengelolaan KK Perairan multi-tahun	Adanya dokumen perencanaan anggaran	+2		
	b. Anggaran tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan Pemerintah namun juga dari kontribusi LSM; pajak, tarif masuk, CSR, dan lain-lain	Adanya dana lain diluar APBN	+1		
TOTAL NILAI UNTUK INPUT (C): 14 ATAU MENYESUAIKAN					
D. Proses –Bagaimana pelaksanaan pengelolaan? Penilaian cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan					
13. Pendidikan dan penyadartahuan Apakah ada perencanaan program pendidikan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan? <i>Proses</i>	Tidak ada program pendidikan dan penyadartahuan	Cukup jelas	0		
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan yang terbatas dan bersifat <i>ad hoc</i>	Kegiatan bersifat tidak terprogram dan insidental	1		
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	Terprogram namun dinilai kurang secara kuantitas	2		
	Terdapat program pendidikan dan penyadartahuan yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	Terprogram dan dilaksanakan dengan baik dan memadai	3		
14. Pemerintah dan swasta di sekitar Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar? <i>Proses</i>	Tidak ada / sangat sedikit proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) antara pengelola dan stakeholders	Cukup jelas	0		
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) antara pengelola dan stakeholders, akan tetapi belum terencana atau terjadwal.	Bukti yang menunjukkan ada proses komunikasi/kerjasama dengan stakeholder terkait (Contoh: Undangan rapat koordinasi)	1		
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) yang terencana dengan stakeholder terkait, akan tetapi implementasinya masih terbatas	Ada dokumen koordinasi rencana kerja antara pengelola dan stakeholder terkait	2		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) yang terencana dan diimplementasikan untuk mendukung kawasan.		3		
Nilai Tambahan	Terdapat komunikasi (dalam konteks studi dan berbagi pengalaman) dengan pengelola kawasan lainnya (misalnya: studi banding untuk pengelolaan kawasan)	Berita acara dan/atau bukti lainnya	+1		
15. Pelibatan dan partisipasi Paraphak Apakah stakeholder memberikan masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan pengelolaan (non-masyarakat lokal)	Paraphak tidak memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan KK Perairan	Cukup jelas	0		
	Paraphak memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan namun tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan	Berita acara dan/atau bukti lainnya	1		
	Paraphak secara langsung berkontribusi pada beberapa pengambilan keputusan dalam pengelolaan	Konsultasi publik, rapat koordinasi, dan/atau bukti lainnya	2		
	Paraphak secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan	Konsultasi publik, rakor, dan/atau MoU dengan stakeholder	3		
	Terdapat kontribusi pendanaan/ kesepakatan yang jelas antara KK Perairan dan operator wisata untuk jasa lingkungan yang memberikan manfaat di tingkat lokal.	MoU dengan operator wisata	+1		
Nilai Tambahan					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
16. Masyarakat lokal Apakah masyarakat lokal yang tinggal atau secara reguler menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam keputusan pengelolaan?	Masyarakat lokal tidak memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	<i>Cukup jelas</i>	0		
	Masyarakat lokal memberikan beberapa masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengambilan keputusan tersebut.	<i>Berita acara dan/atau bukti lainnya</i>	1		
	Masyarakat adat secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevant terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	<i>Berita acara, konsultasi publik, rakor</i>	2		
	Masyarakat adat secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevant terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management	<i>Kelembagaan forum komunikasi yang mendukung proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan; atau bentuk kelembagaan lain</i>	3		
17. Pelatihan pegawai Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan? <i>Inputs/Proses</i>	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	<i>Tidak ada staf/petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan</i>	0		
	Pelatihan dan keahlian pegawai relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	<i>Variasi skil yang dimiliki terbatas</i>	1		
	Pelatihan dan keahlian pegawai memadai, tetapi dapat perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	<i>Terdapat tenaga teknis minimal (perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan)</i>	2		
	Pelatihan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Kawasan Konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	<i>Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
18. Perlengkapkan Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan? <i>Input</i>	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	<i>Tidak ada perlengkapan</i>	0		
	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	<i>Terdapat perlengkapan namun masih kurang</i>	1		
	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	<i>Lebih dari setengah kebutuhan minimal perlengkapan ada</i>	2		
	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	<i>Terdapat kebutuhan minimal perlengkapan (mobilitas, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola yang mendukung mandat pengelolaan – pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil – 10 hektar)</i>	3		
19. Monitoring dan evaluasi Apakah kegiatan pengelolaan dimonitor terhadap kinerja? <i>Perencanaan/Proses</i>	Terdapat monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	<i>Cukup jelas</i>	0		
	Terdapat kegiatan monitoring and evaluasi secara <i>ad hoc</i> , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara regular	<i>Monev dilakukan secara insidental</i>	1		
	Terdapat system monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	<i>Monev dilaksanakan secara regular</i>	2		
	Terdapat system monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	<i>Dilaksanakan secara regular dan adaptif Kegiatan monitoring & evaluasi misalnya METT atau RBM</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
Nilai Tambahan	a. Kawasan berpartisipasi sebagai bagian program monitoring lingkungan nasional atau internasional seperti CARICOMP, CPACC, GCRMIN/ AGGRA atau lainnya (sertakan nama program)	Cukup jelas	+1		
	b. Terdapat kemampuan tanggap darurat di lokasi untuk mengurangi dampak dari selain ancaman	Tersedianya SOP tanggap darurat, keanggotaan staf dalam tim penanganan bencana, dll.	+1		
TOTAL NILAI UNTUK PROSES (D): 25 ATAU MENYESUAIKAN					
b. Outputs – Apa hasilnya? Penilaian pelaksanaan program pengelolaan dan aksi; penyediaan produk dan jasa					
Catatan : Output harus dinilai berdasarkan progres sejak penilaian terakhir. Jika ini merupakan penilaian pertama, responden harus menilai output selama 3 tahun terakhir. Untuk kawasan yang baru, responden dapat melewatkan bagian ini.					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
20. Indikator Konteks Apakah indikator konteks telah diperbaiki	a. Status hukum telah meningkat (mengacu pada pertanyaan no.1 Status Hukum)	Mengacu kepada pertanyaan yang dimaksud. Nilai didapatkan jika terdapat peningkatan skor dibandingkan kajian METT sebelumnya. Catatan: Pertanyaan ini tidak aplikatif jika kondisi tidak berubah	+2		
	b. Peraturan telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.2 Peraturan KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	c. Penegakan Hukum telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.3 penegakan hukum)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	d. Batas kawasan telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.4 batas KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	e. KK Perairan telah terintegrasi dengan ICM (mengacu pada pertanyaan no.5 Integrasi KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	f. Inventarisasi sumberdaya telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.6 Inventarisasi sumberdaya)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	g. Kesadaran dan kepedulian para pihak telah meningkat (mengacu pada pertanyaan no.7)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
21. Produk dan Pelayanan	a. Tanda – tanda batas tersedia atau yang terbaru telah terpasang	Cukup jelas	+1		
	b. Moorings – mooring tersedia atau yang terbaru telah terpasang	Cukup jelas	+2		
	c. Materi pendidikan – materi pendidikan tersedia atau telah dibuat yang baru	Cukup jelas	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
22. Mekanisme pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau kegiatan pengelolaan (misalnya dewan penasihat) Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan partisipasi stakeholder?	Tidak ada mekanisme untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan	Cukup jelas	0		
	Terdapat beberapa mekanisme melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan namun tidak cukup	Ada mekanisme tetapi bersifat non-formal	1		
	Terdapat mekanisme yang memadai untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan	Ada mekanisme dalam kerangka formal (contoh: adanya forum atau kelembagaan lain yang sifatnya memberikan masukan/konsultatif)	2		
23. Aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder (misal acara publik di KK Perairan) Apakah aktivitas pendidikan telah dikembangkan untuk stakeholder	Tidak tersedia aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder	Cukup jelas	0		
	Tersedia beberapa aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder namun tidak cukup	Cukup Jelas – Disertai dokumentasi kegiatan	1		
	Tersedia cukup aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder	Cukup Jelas – Disertai dokumentasi kegiatan	2		
24. Aktivitas pengelolaan Memiliki 2 aktivitas pengelolaan kritis yang telah ditingkatkan untuk menangani ancaman (yang telah dituliskan pada lembar data)	Aktivitas pengelolaan belum meningkat	Cukup jelas	0		
	Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan aktivitas pengelolaan	Dokumentasi yg menunjukkan upaya penanganan untuk mengurangi 2 ancaman utama	1		
	Aktivitas pengelolaan cukup meningkat	Dokumentasi yg menunjukkan upaya penanganan untuk mengurangi 2 ancaman utama diatas, serta hasilnya	2		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
25. Fasilitas pengunjung Apakah fasilitas pengunjung memadai?	Tidak ada fasilitas dan jasa bagi pengunjung walaupun telah diidentifikasi diperlukan	Cukup jelas	0		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	Misal hanya ada papan informasi/papan penunjuk	1		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	Terdapat papan informasi, papan petunjuk, gerbang dan ruang informasi	2		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi)	3		
26. Pungutan Jika pungutan (contoh: Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan kawasan konservasi?	Meskipun telah ada sistemnya, tetapi belum diterapkan (belum dilakukan pungutan).	Cukup jelas	0		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi langsung ke pemerintah pusat dan tidak dikembalikan secara langsung pada kawasan konservasi atau lingkungan sekitarnya	Jika sudah ada SK penerapan PNBPD di kawasan	1		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi didistribusikan kepada otoritas lokal, tidak kepada kawasan	Jika terdapat 2 jenis pungutan, PNBPD dan daerah	2		
	Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk kawasan konservasi dan lingkungan sekitarnya	Bentuk pengelolaan keuangan mandiri (Contoh: BLU)	3		
27. Pelatihan pegawai Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan? Inputs/Proses	Pegawai sudah mendapatkan pelatihan, tetapi dapat ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	Staf pengelola kawasan (contoh: Polhut, PEH) secara otomatis telah mendapatkan pelatihan dasar	2		
	Pelatihan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, dan antispasi kebutuhan kedepan	Dibuktikan dengan dokumentasi atau berita acara kegiatan pelatihan yang relevan dengan pertanyaan	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
TOTAL NILAI UNTUK PROSES (E): 33 ATAU MENYESUAIKAN					
F: Outcomes – Apa yang telah kita capai? Penilaian sejauh mana tujuan telah tercapai					
28. Apakah pengelolaan telah sesuai dengan tujuan kawasan	Pengelolaan belum sesuai dengan tujuan kawasan	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP	0		
	Pengelolaan sebagian kecil sudah sesuai dengan tujuan kawasan	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	1		
	Pengelolaan sebagian besar sudah sesuai dengan tujuan kawasan	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	2		
	Pengelolaan sudah sesuai dengan tujuan kawasan	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	3		
29. Gangguan – Apakah ancaman telah berkurang?	Gangguan meningkat	Data laporan patrol atau data gangguan lainnya	0		
	Gangguan berada pada sekitaran level yang sama	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	1		
	Gangguan telah sedikit berkurang	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	2		
	Gangguan sebagian besar telah berkurang	<i>Sama dengan penjelasan sebelumnya</i>	3		
30. Kondisi sumberdaya – Apakah kondisi sumber daya membaik?	Kondisi sumberdaya alam menurun	Laporan survei monitoring	0		
	Kondisi sumberdaya alam berada pada kisaran level yang sama	Laporan survei monitoring	1		
	Kondisi sumberdaya alam sedikit meningkat	Laporan survei monitoring	2		
	Kondisi sumberdaya alam meningkat secara signifikan	Laporan survei monitoring	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
31. Kesejahteraan masyarakat Apakah kesejahteraan masyarakat meningkat? (beri beberapa contoh) Indikator: - <i>Dampak kawasan secara keseluruhan terhadap peningkatan pendapatan/ekonomi dan standar hidup masyarakat</i>	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat menurun	Hasil kajian, survei, analisis data	0		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat berada pada kisaran level yang sama	Hasil kajian, survei, analisis data	1		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat sedikit meningkat	Hasil kajian, survei, analisis data	2		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat meningkat secara signifikan	Hasil kajian, survei, analisis data	3		
Nilai Tambahan	a. Pengelolaan KK Perairan sesuai dengan budaya lokal termasuk praktek tradisional, hubungan, sistem sosial, fitur budaya, situs bersejarah dan monumen terkait dengan sumber daya perairan dan penggunaannya	Dokumen rencana pengelolaan	+1		
	b. Konflik penggunaan sumberdaya telah menurun	Laporan terkait konflik dan penanganannya	+1		
	c. Semua pihak merasakan manfaat keberadaan kawasan	<i>Pengamanan kawasan swakarsa, atau bentuk-bentuk lain partisipasi aktif masyarakat; Catatan: bukti masyarakat telah merasakan manfaat dari keberadaan kawasan adalah adanya artisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan kawasan</i>	+1		
	d. Manfaat non-finansial dari sumberdaya perairan kepada masyarakat telah dipertahankan atau ditingkatkan	Ada hasil survei/kajian	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
32. Kesadaran lingkungan Apakah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat?	Kesadaran lingkungan dari kondisi sumberdaya, gangguan dan kegiatan pengelolaan telah menurun	Ada hasil survei/kajian/analisis	0		
	Kesadaran lingkungan berada pada kisaran level yang sama	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	Kesadaran lingkungan sedikit meningkat	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Kesadaran lingkungan telah meningkat secara signifikan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		
33. Kepatuhan Apakah pengguna mematuhi peraturan di dalam kawasan	Kurang dari 25% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	0	-	
	25% - 50% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	50% - 75% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Lebih dari 75% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		
34. Kepuasan stakeholder Apakah stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Kurang dari 25% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	0		
	25% - 50% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	50% - 75% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Lebih dari 75% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		
Nilai Tambahan	a. Stakeholder merasa bahwa mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam keputusan manajemen	Ada hasil survei/kajian/analisis	+1	-	
	b. Stakeholder merasa bahwa mereka cukup mewakili dalam proses pengambilan keputusan KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	+1		
TOTAL NILAI UNTUK OUTCOME 27 ATAU ATAU MENYESUAIKAN					

Lampiran 5. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan

1) Penilaian efektivitas Pegelolaan kawasan Konservasi Daratan (*terrestrial*)

Pada lembar penilaian terdapat 30 pertanyaan pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daratan sehingga potensi nilai maksimal adalah 90 poin. Kemudian pada beberapa pertanyaan yaitu nomor 7, 21, 24 dan 30 terdapat nilai tambahan yang masing-masing memungkinkan untuk penambahan 3 poin dari setiap nomor tersebut. Nilai tambahan ini apabila diisi akan menambah poin dan disertakan dalam bilangan pembagi untuk menghitung persentase nilai akhir, namun bila tidak diisi, nilai tambahan tidak disertakan dalam penghitungan nilai akhir.

Pada kawasan tertentu, terutama kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka margasatwa, tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wisata alam. Dengan demikian, pertanyaan yang menyangkut wisata alam tidak disertakan dalam penilaian. Sebagai contoh adalah Cagar Alam Cyclops di Papua yang secara keseluruhan mendapat 60 poin namun tidak menyertakan pertanyaan nomor 25, 27 dan 28 sehingga total nilai yang mungkin dicapai adalah 81.

Kemudian pada nilai tambahan 7, 21, 24 dan 30 terdapat tambahan 4 nilai, maka penghitungan nilai akhirnya adalah sebagai berikut :

- Cagar Alam Cycloop

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Maksimum Skor}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{60}{85} \times 100\% = 70\%$$

- *) Maksimum skor adalah 95 karena terdapat 3 pertanyaan (25, 27 dan 28) yang tidak dijawab karena secara peraturan perundangan tidak dapat diaplikasikan pada kawasan suaka alam, serta terdapat nilai tambahan 4 poin.

Akan tetapi pada kawasan Taman Wisata Alam ataupun Taman Nasional yang memungkinkan adanya keuntungan ekonomis oleh masyarakat dari kawasan dan kegiatan wisata alam, maka pertanyaan nomor 25, 27 dan 28 dapat dijawab sehingga nilai maksimum adalah 90. Dengan nilai tambahan dimisalkan 4 poin maka, penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Taman Wisata Alam Pulau Weh

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{60}{94} \times 100\% = 64\%$$

2) Penilaian efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Penilaian mencakup 6 (enam) elemen evaluasi, jika ada pertanyaan yang tidak diisi (karena mungkin tidak relevan), maka nilai maksimum berubah sesuai dengan jumlah pertanyaan (nilai) pertanyaan yang dinilai saja, nilai akhir berupa persentase dari nilai yang didapat terhadap nilai maksimum yang disesuaikan.

RANGKUMAN NILAI			
NILAI YANG DIPEROLEH	KEMUNGKINAN NILAI TOTAL	KEMUNGKINAN NILAI TOTAL YANG DISESUAIKAN	PERSENTASE
Nilai Total Konteks (A):	26		
Nilai Total Perencanaan (B):	14		
Nilai Total Input (C):	14		
Nilai Total Proses (D):	25		
Nilai Total Output (E):	33		
Nilai Total Outcome (F):	27		
Total:	139		100%

Berbeda dengan penilaian efektivitas pada kawasan konservasi daratan (*terrestrial*), pada penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan perairan, nilai maksimum yang bisa diperoleh kawasan konservasi adalah 139. Dengan demikian untuk mendapatkan nilai akhir maka nilai pembagiannya adalah 139. Berikut contohnya.

- Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{100}{139} \times 100\% = 71\%$$

Keseluruhan konsep skoring memiliki kesulitan dan kemungkinan untuk melenceng. Sistem saat ini mengasumsikan bahwa seluruh pertanyaan telah melingkupi semua isu secara sama. Karenanya, skor akan memberikan penilaian yang lebih baik jika dikalkulasikan sebagai persentase dari tiap enam elemen Kerangka Kerja WCPA (misal: konteks, planning, inputs, process, outputs dan assessments)

Lampiran 6. Tabel Pendekatan dalam membuat resume dan menentukan rekomendasi

KRITERIA	No.	PERTANYAAN	Nilai	KEKUATAN	KELEMAHAN	ISU PRIORITAS	LANGKAH KEDEPAN
Context	1	Status hukum					
	2	Peraturan Kawasan					
Planning	4	Tujuan Kawasan					
	5	Desain Kawasan					
	7	Rencana Pengelolaan					
	21	Perencanaan Penggunaan lahan dan air					
Input	3	Penegakan Peraturan					
	9	Inventarisasi Sumberdaya					
	13	Jumlah Pegawai					
	15	Anggaran					
	16	Kepastian anggaran					
	18	Perlengkapan					
Process	6	Pengukuhan					
	10	Sistem Perlindungan					
	11	Riset					
	12	Pengelolaan Sumberdaya					
	14	Pelatihan Pegawai					
	17	Pengelolaan Anggaran					
	19	Pemeliharaan Perlengkapan					

KRITERIA	No.	PERTANYAAN	Nilai	KEKUATAN	KELEMAHAN	ISU PRIORITAS	LANGKAH KEDEPAN
	20	Pendidikan dan penyadaran					
	22	Pemerintah dan swasta disekitar					
	23	Masyarakat adat dan masyarakat aseli/ tradisional					
	24	Masyarakat Lokal					
	26	Monitoring dan evaluasi					
	28	Operator wisata komersil					
	29	Pungutan					
Output	8	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek					
	27	Fasilitas pengunjung					
Outcome	25	Keuntungan ekonomis					
	30	Kondisi nilai-nilai					

Lampiran 7. Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

(Nama Kawasan)

Nilai		
Skor METT	$\frac{A}{B} \times 100\%$	 %
Penjelasan Nilai		
Konteks	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Perencanaan	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Input	Kekuatan	
%	kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Proses	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Output	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Outcome	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	

Penilai	Fasilitator
Nama Penilai	Nama Fasilitator



DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp, (021) 5720229, Faximile (021) 5720229

